

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Penetapan Pengadilan Agama Rengat tentang Dispensasi Kawin bagi Pasangan yang belum Cukup Umur

Hakim dalam menjatuhkan putusan atau menetapkan suatu perkara yang diajukan kepadanya tentunya harus berdasarkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang sesuai dan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pemohonnya. Pertimbangan hakim merupakan bagian dari isi keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan berupa alasan-alasan sebagai dasar putusan. Dalam hal permohonan dispensasi kawin ini keputusan hakim dalam penyelesaian suatu perkara berbentuk penetapan. Para pihak dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur hanya terdiri dari pemohon saja dan tidak ada pihak lain yang diposisikan sebagai tergugat atau terlawan. Tujuan dari permohonan ini adalah untuk menyatakan atau menetapkan status pemohon, bukan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Dalam buku “Hukum Acara Perdata Indonesia” yang ditulis oleh Sudikno Mertokusumomenjelaskan:

“Putusan perdata dibagi menjadi 2 pertimbangan, yakni pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan hukumnya. Dalam prosesnya terdapat pembagian antara para pihak dan hakim, yakni pihak harus mengemukakan semua peristiwa yang di mohonkan, sedangkan hakim akan mengurus persoalan hukumnya”<sup>139</sup>

<sup>139</sup> Sudikno Mertokusumo. “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 213.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut di atas yang menyebutkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perdata terdiri atas duduk perkara dan tentang hukumnya yakni mengenai peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak dan mengenai hukum yang menjadi urusan hakim yang dalam hal ini merupakan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin.

Ketika hakim dalam menangani suatu perkara, maka hakim akan mengambil keputusan yang putusannya tersebut sebisa mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Agar keputusannya itu dapat diterima oleh para pihak dan masyarakat, maka hakim harus memutuskan perkara dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Jadi dalam setiap pertimbangan putusan yang dikeluarkan oleh hakim, hakim harus menggambarkan setiap hal mengenai fakta-fakta yang ada. Dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Rengat, hakim Pengadilan Agama Rengat lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Berikut adalah pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Rengat dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin.

**1. Duduk Perkaranya**

Mengenai pertimbangan tentang duduk perkaranya ini ialah tugas dari para pihak untuk mengemukakan fakta-fakta dan semua peristiwa.

**a. Alasan Dispensasi Kawin**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa alasan yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah di pengadilan Agama Rengat, berikut alasan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rengat;

1) Sudah melakukan hubungan Suami istri

Yang dimaksud dengan sudah melakukan hubungan suami istri adalah ketika anak Perempuan sudah sedemikian akrabnya dengan seorang pria sulit untuk dipisahkan dan sudah melakukan hubungan suami istri yang tidak berakibat pada kehamilan, sehingga ketika orang tua bermaksud menikahkan anaknya namun terhalang oleh umur yang telah ditetapkan undang-undang sehingga orangtua mendaftarkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama<sup>140</sup>, berikut beberapa permohonan dengan alasan karena sudah melakukan hubungan suami istri di Pengadilan Agama Rengat.

a) Perkara Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki dengan alasan Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan telah melakukan hubungan diluar nikah”<sup>141</sup>.

b) Perkara Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang wanita dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 2 tahun sudah menjalin cinta dan sudah melakukan hubungan suami istri”<sup>142</sup>.

c) Perkara Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>140</sup> Wawancara dengan H. Nur Al Jumat, hakim pengadilan Agama Rengat, pada tanggal 28 Oktober 2019

<sup>141</sup> Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>142</sup> Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 5 bulan sudah menjalin cinta dan sudah melakukan hubungan suami istri”<sup>143</sup>.

d) Perkara Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan alasan tidak bisa dipisahkan karena menurut pengakuan anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 kali dan orang tua sudah malu dengan omongan tetangga”<sup>144</sup>.

e) Perkara Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang wanita dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 9 tahun sudah menjalin cinta dan sudah melakukan hubungan suami istri”<sup>145</sup>.

Alasan pemohon ini perlu dijadikan pertimbangan karena hakim melihat mendesak atau tidak permohonan tersebut. Pemohon menghendaki agar anaknya segera dinikahkan dengan pacarnya demi kebaikan mereka berdua sehingga keduanya tidak terus menerus melakukan perbuatan zina.

2) Takut terjadi hal yang tidak diinginkan

Yang dimaksud takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah, ketika orang tua melihatnya anaknya yang sudah

<sup>143</sup> Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>144</sup> Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>145</sup> Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Rgt.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedemikian akrabnya dengan pacarnya sehingga kedekatan itu membuat kekhawatiran orangtua dari anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga ini yang menjadi alasan para orang tua ingin segera menikahkan anaknya tersebut, karena terhalang oleh sebuah peraturan Batasan minimal usia pernikahan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, maka karena terhalang peraturan tersebut orangtua mengajukan perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat untuk bisa menikahkan anaknya tersebut<sup>146</sup>.

a) Perkara Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud ingin melangsungkan pernikahan anaknya dengan seorang wanita, dengan alasan anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 tahun menjalin cinta dengan seorang wanita dan sudah tidak bisa dipisahkan dan saling mencintai dan sangat ditakuti kalau terjadi sesuatu yang tidak di inginkan”<sup>147</sup>.

b) Perkara Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud ingin melangsungkan pernikahan anaknya dengan seorang wanita, dengan alasan anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang wanita dan sudah tidak bisa dipisahkan dan saling mencintai dan sangat ditakuti kalau terjadi sesuatu yang tidak di inginkan”<sup>148</sup>.

c) Perkara Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang wanita dengan alasan belum cukup umur dan anak Pemohon telah melamar seorang wanita dan menurut rencananya akan dilaksanakan

<sup>146</sup> Wawancara dengan Hj. Rosnah Zaleha, Hakim Pengadilan Agama Rengat, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>147</sup> Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>148</sup> Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secepatnya, karena antara anak pemohon dengan seorang wanita sudah tidak bisa dipisahkan dan Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”<sup>149</sup>.

d) Perkara Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa anak Pemohon telah sekitar 1 tahun menjalin cinta, dan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang wanita dengan alasan sudah tidak bisa dipisahkan dan kedua pihak keluarga masing-masing sudah sepakat untuk menikahkan dengan alasan supaya tidak terjadi perbuatan yang dilarang agama atau berzina”<sup>150</sup>.

e) Perkara Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan alasan sudah menjalin cinta sekitar 1 tahun dan Pemohon menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahannya karena antara anak Pemohon dan seorang wanita sudah tidak bisa dipisahkan karena saling mencintai dan sangat ditakuti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”<sup>151</sup>.

f) Perkara Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan alasan sudah menjalin cinta sekitar 1 tahun dengan seorang wanita dan Pemohon menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahannya karena antara anak Pemohon dan seorang wanita sudah tidak bisa dipisahkan karena saling mencintai dan sangat ditakuti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”<sup>152</sup>.

g) Perkara Nomor 0065/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan alasan sudah menjalin cinta sekitar 1 tahun dengan seorang laki-laki dan Pemohon menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahannya karena antara anak Pemohon dan seorang laki-laki sudah tidak bisa dipisahkan karena

<sup>149</sup> Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>150</sup> Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>151</sup> Penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>152</sup> Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mencintai dan sangat ditakuti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”<sup>153</sup>.

h) Perkara Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang telah menjalin cinta dengan seorang wanita sekitar 1 tahun dengan alasan sudah tidak bisa lagi untuk dipisahkan karena saling mencintai dan sangat ditakuti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”<sup>154</sup>.

i) Perkara Nomor 0080/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Perikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama saling kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak 14 Januari 2018 yang lalu, dan hubungan mereka telah demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut Agama Islam apabila tidak segera dinikahkan”<sup>155</sup>.

j) Perkara Nomor 0083/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II menjalin cinta sekitar 1 tahun, dan Pemohon I dan Pemohon II menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bisa lagi untuk dipisahkan karena khawatir melanggar norma agam dan norma masyarakat”<sup>156</sup>.

k) Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Perikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama saling kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak tanggal 04 April 2018, dan hubungan keduanya telah demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut Agama Islam apabila tidak segera dinikahkan”<sup>157</sup>.

l) Perkara Nomor 0088/Pdt.P/2018/PA.Rgt

<sup>153</sup> Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2018/PA.Rgt

<sup>154</sup> Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>155</sup> Penetapan Nomor 0080/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>156</sup> Penetapan Nomor 0083/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>157</sup> Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan adik Pemohon yang telah menjalin cinta sekitar 1 tahun dengan seorang wanita dan Pemohon menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahan antara adik Pemohon dengan seorang wanita karena sudah tidak bisa dipisahkan karena saling mencintai dan sangat ditakuti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”<sup>158</sup>.

m) Perkara Nomor 0096/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan alsab sudah menjalin cinta sekita 2 tahun dengan seorang wanita dan anak Pemohon sudah melamar seorang wanita, menurut rencana pernikahan akan dilaksanakan dengan secepatnya, karena anak pemohon dengan seorang wanita sudah tidak bisa dipisahkan dan Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”<sup>159</sup>.

n) Perkara Nomor 0105/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan alasan sudah menjalin cinta sekitar 2 tahun dengan seorang laki-laki dan Pemohon menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahannya karena antara anak Pemohon dan seorang laki-laki sudah tidak bisa dipisahkan karena saling mencintai dan sangat ditakuti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”<sup>160</sup>.

o) Perkara Nomor 0109/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan seorang wanita karena sudah menjalin cinta sekitar 2 tahun, dan anak Pemohon telah melamar seorang wanita dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan secepatnya, karena antara anak pemohon dan seorang wanita sudah tidak bisa lagi dipisahkan dan Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”<sup>161</sup>.

p) Perkara Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan alasan sudah menjalin cinta sekitar 7 bulan dengan

<sup>158</sup> Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>159</sup> Penetapan Nomor 0096/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>160</sup> Penetapan Nomor 0105/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>161</sup> Penetapan Nomor 0109/Pdt.P/2018/PA.Rgt.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang laki-laki dan Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki dengan alasan tidak menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan”<sup>162</sup>.

q) Perkara Nomor 0154/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan alasan sudah menjalin cinta sekitar 1 tahun dengan seorang wanita dan Pemohon menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahannya karena antara anak Pemohon dan seorang wanita sudah tidak bisa dipisahkan karena saling mencintai karena khawatir melanggar norma Agama dan norma masyarakat”<sup>163</sup>.

3) Sudah hamil diluar nikah

Anak perempuan yang dimohonkan dispensasi telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan, berikut perkara dispensasi kawin yang di Pengadilan Agama Rengat dengan alasan hamil diluar nikah.

a) Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon karena sudah menjalin cinta dengan calon suaminya sekitar 6 bulan dengan alasan sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah hamil 2 bulan”<sup>164</sup>.

b) Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang telah menjalin cinta dengan seorang perempuan sekitar 2 tahun dengan alasan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil dengan usia 2 bulan”<sup>165</sup>.

c) Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Rgt

<sup>162</sup> Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>163</sup> Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>164</sup> Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>165</sup> Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon yang telah menjalin cinta dengan seorang perempuan sekitar 3 tahun dengan alasan sudah tidak bisa dipisahkan, karena sudah hamil 2 bulan dan orang tuapun sudah malu dengan omongan tetangga”<sup>166</sup>.

d) Perkara Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon yang telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki sekitar 7 bulan dengan alasan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil dengan usia kandungan sudah empat bulan”<sup>167</sup>.

e) Perkara Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang wanita dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 1 tahun sudah menjalin cinta dan sudah hamil selama 5 bulan”<sup>168</sup>.

f) Perkara Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon yang telah menjalin cinta dengan seorang perempuan sekitar 4 tahun dengan alasan sudah hamil diluar nikah dengan usia kandungan 2 bulan”<sup>169</sup>.

g) Perkara Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon yang telah menjalin cinta dengan seorang perempuan sekitar 3 tahun dengan alasan sudah hamil diluar nikah dengan usia kandungan 5 bulan”<sup>170</sup>.

h) Perkara Nomor 0085/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon yang telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki sekitar 1 tahun dengan alasan sudah tidak bisa

<sup>166</sup> Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>167</sup> Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>168</sup> Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>169</sup> Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>170</sup> Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipisahkan karena saling mencintai dan sudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (hamil 1 bulan)”<sup>171</sup>.

i) Perkara Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon menikah dengan seorang wanita yang berkenalan dan telah terjadi hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun dan keduanya saling cinta, dengan alasan demi kebaikan keduanya dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan”<sup>172</sup>.

j) Perkara Nomor 0118/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon dengan seorang laki-laki yang telah 4 bulan menjalin cinta dengan alasan sudah hamil 3 bulan”<sup>173</sup>.

k) Perkara Nomor 0123/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon dengan seorang perempuan yang telah 1 tahun menjalin cinta dengan alasan sudah hamil 6 bulan”<sup>174</sup>.

l) Perkara Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin asmara cinta dan berpacaran lebih kurang selama 2 tahun, dan masing-masing Pemohon I dan Pemohon II menilai dengan seksama seharusnya melangsungkan pernikahan keduanya dengan alasan bahwa sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini dibuktikan atas pengakuan mereka bahwa anak Pemohon II sudah hamil lebih kurang 1 bulan”<sup>175</sup>.

m) Perkara Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang sudah 1 tahun menjalin cinta dengan alasan sudah hamil 2 bulan”<sup>176</sup>.

<sup>171</sup> Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>172</sup> Penetapan Nomor 0094/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>173</sup> Penetapan Nomor 0118/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>174</sup> Penetapan Nomor 0123/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>175</sup> Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>176</sup> Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n) Perkara Nomor 0137/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon yang telah menjalin cinta dengan seorang Perempuan sekitar 2 tahun dennen alasan sudah hamil 4 bulan”<sup>177</sup>.

o) Perkara Nomor 0139/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang sudah 3 tahun menjalin cinta dengan alasan belum cukup umur”<sup>178</sup>.

p) Perkara Nomor 0152/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon yang telah menjalin cinta dengan seorang Perempuan sekitar 1 tahun 1 bulan dengan alasan sudah hamil 4 bulan”<sup>179</sup>.

q) Perkara Nomor 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang sudah 1 tahun menjalin cinta dengan alasan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali, serta telah hamil Selama 3 bulan”<sup>180</sup>.

4) Suka sama suka dan sulit untuk dipisahkan

Yang dimaksud dengan Suka sama suka dan sulit untuk dipisahkan merupakan salah satu alasan yang dia ajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama Rengat yang mana anak Pemohon sendiri sudah sekian lama menjalin cinta dan keduanya sulit untuk dipisahkan berikut berkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rengat dengan

<sup>177</sup> Penetapan Nomor 0137/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>178</sup> Penetapan Nomor 0139/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>179</sup> Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>180</sup> Penetapan Nomor 0200/ Pdt.P/2018/PA.Rgt.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan suka sama suka dan sulit untuk dipisahkan, dikarenakan terhalang batas usia untuk melangsungkan pernikahan maka pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rengat<sup>181</sup> berikut perkara Dispensasi Kawin dengan alasan-suka sama suka:

a) Perkara Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan alasan tidak bisa di pisahkan”<sup>182</sup>.

b) Perkara Nomor 0104/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang sudah mejalin cinta sekitar 8 bulan dengan alasan tidak bisa dipisahkan dan orangtua pun sudah malu dengan omongan tetangga”<sup>183</sup>.

c) Perkara Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II menjalin cinta sekitar 1 tahun, dan Pemohon I dan Pemohon II menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling cinta”<sup>184</sup>.

d) Perkara Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang sudah 1 tahun menjalin cinta dengan alasan belum cukup umur”<sup>185</sup>.

<sup>181</sup> Wawancara dengan Murawati, MA. Hakim Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 28 Oktober 2019

<sup>182</sup> Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>183</sup> Penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>184</sup> Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>185</sup> Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang sudah 1 tahun menjalin cinta dengan alasan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan sudah saling sayang dan diminta dinikahkan”<sup>186</sup>.

f) Perkara Nomor 0160/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang sudah 4 tahun menjalin cinta dengan alasan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan sudah saling sayang dan diminta dinikahkan”<sup>187</sup>.

**b. Keterangan pihak yang beracara**

Keterangan para pihak tersebut harus mengenai peristiwa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan disampaikan dalam persidangan. Keterangan para pihak juga berupa kesaksian mengenai peristiwa yang sebenarnya. Dalam perkara dispensasi nikah, pemohon biasanya adalah orang tua dari anak yang akan melaksanakan perkawinan. Keterangan para pihak meliputi keterangan pemohon, anak pemohon, calon istri atau suami anak pemohon, calon besan pemohon<sup>188</sup>.

Hakim Pengadilan Agama Rengat menyebutkan bahwa keterangan para pihak yang harus didengar oleh Majelis hakim tidak

<sup>186</sup> Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>187</sup> Penetapan Nomor 0160/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>188</sup> Wawancara dengan H Nur Al Jumat, Hakim Pengadilan Agama Rengat, pada tanggal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya berasal dari Pemohon dan anak Pemohon, melainkan fakta dan kenyataan yang berasal dari calon suami anak pemohon dan keluarganya untuk memperkuat permohonan yang diajukan. Selain keterangan yang diberikan oleh anak pemohon dan calon mantu pemohon, dalam pertimbangannya, hakim Pengadilan Agama Rengat juga mendengar dari calon besan pemohon untuk mendapatkan fakta yang lebih relevan.

Dalam pertimbangannya, hakim juga mempertimbangkan kehadiran para pihak atau Pemohon ketika persidangan berlangsung. Hakim akan memperkuat pertimbangan hakim karena apa yang menjadi bagian dari permohonan dapat ditanyakan langsung oleh hakim kepada pemohon. Selain itu, hakim juga akan memberi nasehat kepada pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan permohonan. Menurut hakim Pengadilan Agama Rengat keterangan para pihak harus peristiwa yang sebenarnya, meihat dan dialamai sendiri serta disampaikan didalam persidangan, keterangan tersebut antara lain ialah berasal dari anak Pemohon dan calon menantu Pemohon, berikut contoh keterangan para pihak yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Perkara Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang masih berumur 15 tahun 6 bulan, yang sudah menjalin cinta sekitar 6 bulan dengan seorang laki-laki yang berumur 19 tahun, dengan alasan keduanya tidak biasa di pisahkan. Ketika dalam persidangan hakim mendengar keterangan anak pemohon dan calon suaminya telah berkenalan dan berpacaran 6 bulan lebih, calon suaminya anak pemohon tersebut telah bekerja dan sanggup menafkahi calon suaminya secara lahir dan batin serta mampu menjadi suami yang baik dalam menjalankan rumah tangga demi terwujudnya sakinah, mawadah wa rahmah<sup>189</sup>.

Denganadanya keterangan para pihak yang saling mendukung dan tidak saling bertentangan seperti tersebut diatas maka hakim Pengadilan Agama Rengat dalam mengkonstatir perkara akan lebih pasti. Hakim Pengadilan Agama Rengat menyebutkan bahwa keterangan para pihak yang diberikan selama persidangan akan sangat menentukan langkah-langkah hakim dalam melihat, mengakui dan membenarkan perkara. Ini berarti bahwa hakim tidak hanya membuat kesimpulan yang dangkal atau secara gegabah menyimpulkan tentang kebenaran peristiwa yang disampaikan oleh parapihak tersebut.

<sup>189</sup> Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Rgt



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Nomor Perkara 0160/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

Pemohon mengajukan dispensai nikah untuk anak Pemohon yang masih berumur 15 tahun 2 bulan, bahwa nak pemohon tersebut telah sekitar 4 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki dengan alasan sudah tidak bias dipisahkan lagi dan saling sayang dan diminta dinikahkan,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini pemohon hadir sendiri kepersidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat agar Permohonan mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Anak Pemohon mencapai umur 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon<sup>190</sup>.

Keterangan pihak selanjutnya ialah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai berikut,

“Bahwa anatar ia dan calon suaminya telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah menghindari hal-hal yang melanggar norma agama, Bahwa ia telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga; Bahwa antara ia dan calon suami, tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak ada halangan

---

<sup>190</sup> Penetapan Nomor 0160/Pdt.P/2018/PA.Rgt

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan; Bahwa calon suaminya bekerja sebagai karyawan took barang harian”<sup>191</sup>.

#### 3) Perkara Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang mana anaknya dengan alasan bahwa anak pemohon tersebut sudah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan dan bermaksud ingin menikah namun belum cukup umur. Umur anak pemohon 15 tahun 2 bulan dan masih 3 tahun 10 bulan untuk mencapai 19 tahun. Dalam persidangan majelis hakim memberikan nasehat agar anak pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis hakim mendengarkan keterangan dari anak pemohon, sebagaimana anak pemohon menjelaskan bahwa kepada majelis hakim bermaksud menikahi perempuan yang di pacarinya selama 1 tahun namun ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur, anak pemohon juga menjelaskan bahwa dia siap menjadi seorang suami dan bertanggung jawab dengan keluarga, anak pemohon juga menjelaskan bahwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan perkawinan, selanjutnya anak pemohon menjelaskan mengenai pekerjaannya ialah petani<sup>192</sup>.

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan dari pihak selanjutnya yang di dengar oleh majelis adalah mendengar keterangan calon istrinya, calon istrinya ini berumur 22 tahun siap menikah dengan anak pemohon yang sudah saling mencintai dan sepakat untuk menikah, calon mantu pemohon juga menjelaskan bahwa dirinya dan anak pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, dan selanjutnya calon mantu pemohon juga menjelaskan bahwa dirinya siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga<sup>193</sup>.

#### 4) Perkara Nomor 0158/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Bahwa Pemohon mengajukan Perkara dispensasi kawin untuk anak pemohon yang masih berumur 18 tahun 1 bulan, dikarenakan anak pemohon telah berpacaran dengan seorang perempuan sekitar 1 tahun dengan alasan sudah tidak bias dipisahkan lagi dan sudah saling sayang dan diminta untuk dinikahkan. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya dan untuk bersabar menunggu usia Anak Pemohon mencapai usia 19 tahun tetapi tidak berhasil,

---

<sup>193</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon<sup>194</sup>.

Kemudian setelah Hakim mengambil keterangan dari Pemohon, Majelis Hakim kemudian mendengarkan keterangan anak pemohon sebagai berikut.

“Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah dan telah berpacaran selama setahun; Bahwa benar anak Pemohon anak menikah dengan calon istrinya; Bahwa anak pemohon telah siap menjadi seorang suami dan bertanggung jawab kepada keluarga; Bahwa anak pemohon dan calon istrinya tidak ada gubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan, Bahwa anak pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan”<sup>195</sup>.

Setelah mendengar keterangan dari anak pemohon, kemudian Majelis Hakim juga meminta keterangan dari calon mantu Pemohon yang memberikan keterangan sebagai berikut;

“Bahwa antara ia dan anak Pemohon telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah; Bahwa benar ia dan anak Pemohon akan menikah; Bahwa penghasilan anak Pemohon sudah tetap dengan karyawan indomaret dan ia siap memenuhi kebutuhan rumah tangga; Bahwa ia telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga; Bahwa antara ia dengan anak pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan perkawinan”<sup>196</sup>.

<sup>194</sup> Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Rgt

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Nomor Perkara 0106/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara dispensasi kawin untuk kedua anaknya yang mana anak Pemohon I masih berumur 15 tahun 4 bulan, sedangkan anak Pemohon II berumur 17 tahun 3 bulan, keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih semala 1 tahun, Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah sama-sama hadir dan memberikan keterangan bahwa telah berpacaran 1 tahun dan saling mencintai, bukan paksaan maupun bujukan pihak manapun<sup>197</sup>.

6) Nomor Perkara 0104/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk adik kandung yang masih berumur 17 tahun, dikarenakan adik pemohon telah sekitar 8 bulan menjalin cinta dengan seorang perempuan, adapun yang menjadi alasan sudah tidak bisa dipisahkan dan sudah malu dengan omongan tetangga.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini pemohon hadir sendiri kepersidangan, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah

---

<sup>197</sup> Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Rgt

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon<sup>198</sup>.

Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan dari Pemohon kemudian Majelis Hakim mendengar keterangan dari adik pemohon, sebagai berikut,

“Bahwa antara adik pemohon dan calon istrinya saling mencintai dan sepakat untuk menikah dan telah berpacaran selama 8 bulan; Bahwa benar adik pemohon akan menikah dengan calon istrinya; Bahwa adik pemohon telah siap menjadi suami dan bertanggung jawab kepada keluarga; Bahwa antara adik pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan perkawinan; Bahwa adik pemohon sudah bekerja membantu keluarga mendoos sawit (memanen sawit)”<sup>199</sup>.

Majelis Hakimpun mendengar keterangan calon istrinya sebagai berikut:

“Bahwa antara ia dan adik pemohon telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah; Bahwa benar ia akan menikah dengan adik pemohon; Bahwa penghasilan adik pemohon sudah tetap dengan bekerja sebagai petani dan siap memenuhi kebutuhan rumah tangga; Bahwa ia telah siap menjadi seorang istri dan ibu

<sup>198</sup> Penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2018/PA.Rgt

<sup>199</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga; Bahwa antara Ia dengan adik Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan perkawinan”<sup>200</sup>.

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa keterangan yang diberikan oleh para pihak di persidangan ini sangat penting untuk menentukan keputusan hakim yang akan diberikan nantinya. Dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, yang ditulis oleh M Yahya Harahap berpendapat bahwa:

“Hanya fakta-fakta yang diajukan di persidangan yang boleh dinilai dan diperhitungkan menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Sehubungan itu, fakta yang boleh dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan para pihak kepada hakim di persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara”<sup>201</sup>.

**c. Alat Bukti Persidangan**

Pembuktian dalam hukum acara perdata adalah dengan alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, dan keterangan ahli. Alat bukti menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat karena hakim Pengadilan Agama Rengat selain mendengar peristiwanya juga harus memastikannya lagi dengan alat bukti yang ada. Dalam hal ini setidaknya ada empat alat bukti yang bisa digunakan dalam

<sup>200</sup>*Ibid.*

<sup>201</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hlm.501.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengajuan dispensasi kawin diusia dini<sup>202</sup>. Alat bukti tersebut diberi kode P.1 untuk Surat Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, surat tanda penduduk ini sangat penting menjadi pertimbangan hakim sebab hakim mempunyai kewenangan mengadili berdasarkan wilayah yurisdiksi, jika KTP Pemohon tidak masuk berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka hakim tidak menerima perkara tersebut. Selanjutnya buku kutipan akta nikah yang mana pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut lahirlah anak yang dimintakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama untuk itu diberi kode P.2, selanjutnya akte kelahiran atau kartu keluarga yang menerangkan bawa anak yang dimintakan dispensasi kawin ini adalah benar anak dari Pemohon yang di beri kode P.3 kemudian surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan (N-9) dari KUA Setempat kemudian diberi tanda P.4. jika anak pemohon sudah hamil, maka yang menjadi alat bukti ialah surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa anak Pemohon memang sudah hami kemudian diberi kode P.5. hal ini untuk memperkuat alat bukti dalam pengajuan dispensasi kawin.

Beberapa alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat, berikut alat bukti yang disampaikan oleh pihak berperkara kepada Majelis Hakim dalam perkara Dispensasi Kawin.

<sup>202</sup> Wawancara dengan Dra. Murawati, M.A., hakim Pengadilan Agama Rengat, pada tanggal 28 Oktober 2019



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Nomor Perkara 0104/Pdt.P/2018/PA.Rgt
  - a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1402075312930001 tanggal 18 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dias Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotocopy sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis Hakim, yang oleh ketua Majelisya selanjutnya diberi tanda bukti (**P.1**);
  - b) Asli surat keterangan Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petaling Jaya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermatera cukup, selanutnya diberi tanda bukti (P.2);
  - c) Fotocopy kartu keluarga Nomor 14020706070844660 yang telah dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil tanggal 09 September 2016, setelah diperiksa serta bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telahematerai cukup, selanjutnya dibri tanda bukti (**P.3**)
  - d) Asli surat keterangan kematian atas nama ibu kandung yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2018 oleh Kepala Desa Petaling Jaya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4)

e) Surat keterangan keluarga atasnama Ibu kandung dan Pemohon yan dilkeluarkan pada tanggal 24 Juli 2018 oleh Kepala Desa Petaling Jaya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5)

f) Asli surat Penolakan pernikahan (N.9) Nomor B-471/Kua.04.1/PW.01/07/2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6)<sup>203</sup>.

2) Contoh lain dalam perkara nomor 0106/Pdt.P/2019/PA.Rgt, bukti tertulis yang di sampaikan ke Majelis Hakim sebagai berikut;

a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1409031809710001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate Kuantan Singingi tertanggal 25 Juni 2012 bukti yang mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitra Pengadila Agama Rengat, serta telah disesuaikan

<sup>203</sup> Penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis d Persidangan dan dibeai tanda bukti (P.1)<sup>204</sup>

- b) Fotocopy Buku Kutipan akta Nikah atasnama Pemohon I Nomor 252/51/VIII/1992 tertanggal 21 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama BL Umpu Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dan fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisiir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan Aslinya dan ternyata sesuai dan telah di paraf oleh ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2)
- c) Fotocopy kartu keluarga atasnama Pemohon I Nomor 1409030701088371 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 14 Oktober 2016 bukti mana telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di Persidanan dan diberi tanda bukti (P.3)
- d) Fotocopy surat keterangan kelahiran anak Pemohon I Nomor 30834/T/2007/477 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan

<sup>204</sup> Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singingi tertanggal 25 Oktober 2007 bukti mana telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Penadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di Persidangan da diberi tanda bukti **(P.4)**

- e) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Nomor B.422/Kua.04.11.5/PW.01/05/2018 yang dikeluran tanggal 25 Juni 2018 dan diberi tanda bukti **(P.5)**<sup>205</sup>
- f) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 14090306-3760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatn Kuantan Singingi tertanggal 22 Juni 2012 bukti mana telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta tela disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di Persidangan da dberi tanda bukti **(P.6)**
- g) Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor 161/09/VIII/200 teranggal 7 Agustsu 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan dan fotocopy tersebut telah diberi materai dan secukupnya dan telah dilegalisir oleh

<sup>205</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di paraf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.7**)

- h) Fotocopy kartu keluarga atasnama Pemohon II Nomor 1409030701087326 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 18 Nopember 2014 bukti mana telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di Persidanan dan diberi tanda bukti (**P.8**)
- i) Fotocopy surat keterangan kelahiran anak Pemohon II Nomor 1409CLT712201028162 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 18 Nopember 2014 bukti mana telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di Persidangan dan diberi tanda bukti (**P.9**)
- j) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Nomor B.420/Kua.04.11.5/PW.01/05/2018 yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan tanggal 25 Juni 2018 dan diberi tanda bukti  
(P.10)<sup>206</sup>

Bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon pada perkara ini merupakan bukti-bukti yang umum diajukan oleh para Pemohon dispensasi kawin. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menjelaskan “hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk mendapatkan kepastian mengenai peristiwa yang bersangkutan. Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya”<sup>207</sup>.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat M Yahya Harahap yang mengatakan “prinsip ajaran dan sistem pembuktian, harus ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan. Mengabaikan penegakan dan penerapan ajaran dan sistem pembuktian dalam pemeriksaan permohonan, dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal. Tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam penyelesaian permohonan”<sup>208</sup>.

Dari pendapat diatas bahwa hakim Pengadilan Agama Rengat dalam pelaksanaanya tetap menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon, alat bukti diatas merupakan alat bukti umum dalam pengajuan dispensasi kawin, dan pemohon

<sup>206</sup> *Ibid.*

<sup>207</sup> Sudikno Mertokusumo, *loc.cit*, hlm. 110.

<sup>208</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.39-40

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguatkan bukti-bukti diatas dengan menghadirkan saksi untuk mengutkan keyakinan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin.

## 2. Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rengat

Pertimbangan tentang hukumnya adalah apa yang menjadi urusan hakim yakni mengenai hukumnya. Para pihak mengemukakan peristiwa dan hakim menentukan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara permohonan dispensasi kawin bagi calon Pengantin dibawah umur adalah sebagai berikut:

### a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur adanya dispensasi perkawinan yang dapat dimintakan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama yakni pada Pasal 7 Ayat (2). Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan.

Berikut penetapan yang mencantumkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

#### 1) Perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbngan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak kadungnya telah beralasan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah”<sup>209</sup>.

#### 2) Perkara Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Menimbang bahwa oleh karena anak pemohon berumur kurnag dari 19 tahun, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Menimbang bahwa untuk kepentingan diatas maka Pengadilan Agama Rengat perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 6 huruf (e) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”<sup>210</sup>.

Dari data diatas hakim tidak hanya mencantukan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan namun tetap mencantumkan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. M Yahaya Harahap mengatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal – pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan<sup>211</sup>.

Namun pada penerapannya hakim terkadang tidak mencantumkan pasal yang terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut. Terkadang perkaranya sama namun pertimbangan hukum yang berbeda-beda.

<sup>209</sup> Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>210</sup> Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>211</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.810.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun Undang-Undang memerintahkan pencantuman pasal-pasal yang diterapkan dalam putusan, namun hal itu tidak diindahkan. Pada masa belakangan ini, putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama sampai kasasi, sangat mandul tentang hal ini. Jarang dijumpai putusan yang lengkap mencantumkannya. Terkadang putusan itu membingungkan, karena tidak jelas pasal peraturan perundangan mana yang dijadikan rujukan dan landasan pertimbangan. Selain daripada itu, putusan yang lalai mencantumkannya, dianggap bukan merupakan cacat yang serius, oleh karena itu selalu ditolerir<sup>212</sup>.

**b. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**

Hakim dalam pertimbangan penetapan dispensasi kawin menggunakan dasar hukum yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama terutama pada Pasal 49 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal tersebut dijelaskan

<sup>212</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa dispensasi kawin ini menjadi salah satu wewenang Pengadilan Agama. Hal ini secara tidak langsung menjadi legitimasi hakim untuk memutus perkara dispensasi kawin sekaligus menjadi dasar pertimbangan dari keputusan hakim, berikut pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di pengadilan agama rangat:

Dalam perkara Perkara nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Rgt sebgai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan juga telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Perkara ini termasuk Kompetensi relative Pengadilan Agama Rengat”<sup>213</sup>.

Dalam perkara Nomor 0160/Pdt.P/2018/PA.Rgt sebagai berikut :

“Menimbang bahwa permohonan pemohon, telah sesuai menurut ketentuan Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) undang-undang 1 tahun 1974 oleh itu majelis itu berpendapat Pengadilan Agama Renga berwenang mengadili perkara in”<sup>214</sup>.

Dalam Perkara Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA Rengat sebagai berikut:

“Menimbang bahwa permohonan pemohon, telah sesuai menurut ketentuan Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor

<sup>213</sup> Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>214</sup> Penetapan Nomor 0160/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) undang-undang 1 tahun 1974 oleh itu majelis itu berpendapat Pengadilan Agama Rengas berwenang mengadili perkara in”<sup>215</sup>.

Dalam perkara Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Rgt sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karena menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2019; Menimbang bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengas, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengas”<sup>216</sup>

Dalam perkara Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Rgt sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karena menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 Tentang PERadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2019; Menimbang bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengas, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengas”<sup>217</sup>

Dari data penetapan diatas Pertimbangan yang digunakan ialah wewenang pengadilan Agama Rengas sebagaimana hakim mengadili berdasarkan wilayah hukum Pengadilan Agama Rengas sebagaimana bukti dari Pemohon yakni bukti Kartu Tanda Penduduk. disamping

<sup>215</sup> Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>216</sup> Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>217</sup> Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang mengadili Hakim Pengadilan Agama Rengat juga menerapkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai tanggungan biaya perkara yang dibebankan kepada Pemohon, sebagai berikut:

Dalam Perkara Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Rgt :

“Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama”<sup>218</sup>

**c. Kompilasi Hukum Islam**

Selain dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hakim juga mencantumkan Kompilasi hukum Islam dalam Pertimbangan dasar hukumnya dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat, berikut beberapa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat yang mencantumkan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hakim.

**1) Perkara Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Rgt**

“Menimbang bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, petalian kerabat seenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak

<sup>218</sup> Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Rgt.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin”<sup>219</sup>.

#### 2) Perkara Nomor 0160/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Menimbang bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, petalian kerabat seenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun batin”<sup>220</sup>.

#### d. Kaidah Fikih

Hakim Pengadilan Agama Rengat tidaklah selalu normatif dengan apa yang dikatakan Undang-undang akan tetapi masih mau membuka kembali pemikiran yang terkandung dalam Undang-Undang serta berkenan melihat fenomena sosial yang kompleks. Sebagaimana dibuktikan ketika hakim pengadilan agama rengat melihat bahwa calon mempelai laki-laki dipandang sudah siap baik itu dari sisi perekonomian, dinilai matang mental untuk membangun sebuah rumah tangga. Dan dari pihak keluarga yang selalu khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Tindakan hakim ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya.

Perkara dispensasi kawin ini tergolong darurat, sehingga apabila dispensasi kawin tidak dikabulkan maka lima masalah dalam darurat itu terganggu, salah satunya ialah menjaga keturunan,

<sup>219</sup> Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Rgt

<sup>220</sup> Penetapan Nomor 0160/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam telah mengatur dalam menjaga keturan ini dianjurkan untuk menikah, sehingga untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, untuk itu jika alasan pada umumnya pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya dengan alasan sudah saling mencintai dan begitu akrabnya tidak dikabulkan maka anak tersebut bisa saja melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama.

Maka dalam penetapannya Hakim Pengadilan Agama Rengat selain menggunakan hukum tertulis hakim dalam mempertimbangkan putusannya juga berdasarkan pada hukum tidak tertulis seperti *kaidah fiqhiyyah*. *kaidah fiqhiyyah* merupakan kaidah dalam Hukum Islam yang berisi tentang asas yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan di bawah umur.

Berikut penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah yang menggunakan kaidah fiqhiyah:

#### 1) Perkara Nomor 0160/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashaolatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut, yang artinya “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”<sup>221</sup>.

dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya: “Tindakan

<sup>221</sup> Penetapan Nomor 0160/Pdt.P/2018/PA.Rgt

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”<sup>222</sup>.

2) Perkara Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Menimbang bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum sertapendapat pakar hukum Islam menegaskan sebagai berikut

لا ضرر ولا ضرار

Artinya (tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain) Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam Hadis nomo 2332;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al Fiqh, 177 halaman 208)<sup>223</sup>.

3) Pekara Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Rgt

“Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)<sup>224</sup>,

dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya: “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”<sup>225</sup>.

<sup>222</sup> *Ibid.*

<sup>223</sup> Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Rgt.

<sup>224</sup> Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Rgt

<sup>225</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari kaidah yang digunakan hakim diatas ialah mengambil kemaslahatan antara calon istri dan calon suami telah begitu erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa apabila keduanya tidak segera dilaksanakan Perkawinan. Dan dari segi fisik bahwa calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin telah pantas melakukan perkawinan. Selanjutnya ialah menolak kerusakan bahwa hubungan mereka berdua yang sudah begitu eratnya dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinahan serta kekhawatiran adanya pencemaran nama baik jika mereka berdua tidak segera dikawinkan.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa,

“Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif”<sup>226</sup>.

Dari titik inilah hakim Pengadilan Agama Rengat menetapkan penetapan permohonan dispensasi kawin ini dengan kaidah fiqhiyah, berdasarkan amatan penulis serta kehati-hatian penulis dalam menafsirkan kaidah tersebut, para hakim Pengadilan Agama Rengat ini justru tidak kaku, dan melakukan pertimbangan yang matang dari berbagai sisi. Undang-Undang perkawinan memang menetapkan batas umur diperbolehkannya suatu perkawinan. Keterangan Pemohon ini telah dikuatkan meminta keterangan langsung calon mempelai, alat bukti tertulis yakni P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta

<sup>226</sup> Sudikno Mertokusumo *Op.cit.*, hlm.213.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat bukti tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi yang membenarkan dan menguatkan persoalan tersebut

Hubungan cinta kasih bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan; serta kenyataan bahwa anak Pemohon dengan calaonnya tersebut ternyata tidak terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bias menghalangi kelangsungan pernikahan mereka.

**B. Alasan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rengat**

Dalam penelitian ini dispensasi kawin yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada tahun 2018 itu ada 49 perkara yang masuk 3 perkara yang ditolak dan 1 perkara yang dicabut, adapun yang menjadi alasan pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ialah, sudah melakukan hubungan suami istri 5 perkara, takut terjadi hal yang tidak diinginkan 17 perkara, sudah hamil diluar nikah 17 perkara, suka sama suka 6 perkara, kesemua perkara tersebut ditolak untuk menikah di Kantor Urusan Agama karena umur anak pemohon belum sampai batas minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Di dalam amar penetapan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yaitu memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya. Dengan pertimbangan bahwa akan menimbulkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madharat yang lebih besar jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan. Seperti akan dikhawatirkan akan melakukan zina yang menambah dosa, serta terjadi pernikahan dibawah tangan (nikah sirri) yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi setelahnya<sup>227</sup>. Alasan hakim tersebut menurut penulis sudah tepat sebab tidak ada peraturan khusus yang membahas tentang persoalan dispensasi kawin.

Dari dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon, ada tiga sudut pandang yang penulis simpulkan, yakni sebagai berikut:

#### 1. Aspek Yuridis

Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2018 sudah berpedoman pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas umur kawin yaitu untuk pria berusia 19 tahun sedangkan untuk wanita berusia 16 tahun.<sup>228</sup> Artinya Undang-Undang tidak menginginkan terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur, anak-anak muda Indonesia yang usianya belum mencapai usia tersebut dianggap belum mampu melakukan tindakan-tindakan hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun Undang-Undang tersebut memberikan jalan apabila dalam keadaan yang sangat memaksa untuk melangsungkan perkawinan, maka bisa dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama

<sup>227</sup> Wawancara dengan Dra.Rosnah Zaleha, MA. Hakim Pengadilan Agama Rengat, pada tanggal 28 Oktober 2019.

<sup>228</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 119.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan.

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”<sup>229</sup>.

seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) Ketentuan batas umur ini, disebutkan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun”<sup>230</sup>. didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang mana calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar tujuan perkawinan tercapai.

## 2. Aspek Fikih

Al-quran maupun Hadis tidak menentukan batasan umur pernikahan bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. pandangan fiqh dalam hal perkawinan di usia dini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut madzhab Syafi'i bahwa bagi pria yang dikatakan baligh ialah dengan ditandai keluarnya air mani dan mencapai

<sup>229</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet.VII (Bandung; Citra Umbara, 2011), hlm. 5.

<sup>230</sup> Kompilasi Hukum Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menstruasi (haidh) bagi wanita minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Syafi'i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.

Dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat tahun 2018, Majelis Hakim merujuk pendapat ulama, namun jika perkawinan ini tetap di lakukan, maka harus mengajukan di perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.

### 3. Aspek Filsafat Hukum Islam

Perkawinan tidak dipandang dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushaharah*. Namun saat ini, perkawinan lebih ditekankan pada hubungan kelamin, oleh karena itu, tidak adanya ketentuan secara khusus mengenai batas umur, Meskipun secara eksplisit ketentuan usia tidak disebutkan dalam Al-quran atau hadis Nabi Muhammad SAW., namun perkawinan ini sebagai peristiwa hukum, dalam pandangan hukum islam berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban suami-istri. Perkawinan mengandung arti melibatkan orang-orang yang sudah cukup dewasa (baligh). Selain itu, dari adanya persetujuan atau izin sebagai syarat perkawinan juga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh pengertian bahwa perkawian berlangsung atas persetujuan orang yang sudah dewasa.

Kondisi keluarga yang bahagia merupakan bentuk dari keluarga ideal yang dicita-citakan dan didambakan oleh setiap pasangan suami-istri. Sebab keluarga yang bahagia adalah keluarga yang seluruh anggotanya bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekacauan dan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.

Maka dalam pandangan filsafat hukum Islam bahwa apa yang dilakukan Majelis Hakim terhadap penetapannya tentang dispensasi kawin ini sudah tepat sebab perkawinan bukan hanya sekedar hubungan layaknya suami-istri, akan tetapi lebih dari itu, yakni adanya tanggung jawab antara suami-istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya serta pertimbangan maslahat untuk masa depan kedua pasangan tersebut.

Untuk dispensasi yang ditolak di Pengadilan Agama Rengat itu dikarenakan yang memohon bukan pihak memiliki kepentingan langsung, seperti orang tua anak, atau dalam pemeriksaan persidang ketidak ada kesesuaian keterangan para pihak.

### C. Tinjauan Sadd al- Dzariah terhadap Dispensasi Kawin bagi calon pengantin diusia dini di Pengadilan Agama Rengat

Sebelum membahas tinjauan Sadd al-Dzariah, terdapat beberapa hal yang menurut penulis perlu diperhatikan agar dapat dengan mudah dipahami.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana teori – teori yang telah penulis paparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa Sadd al-Dzariah adalah mencegah atau menutup suatu perbuatan yang dilarang agar tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah). Dan pada dasarnya semua hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT pada umat manusia yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan. Sadd al-Dzariah merupakan salah satu perbuatan hukum yang diatur oleh hukum Islam.

Meskipun memiliki berbagai istilah yang berbeda – beda, namun maksud dan tujuan Sadd al-Dzariah tetaplah sama antara satu dan yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Sehingga menimbulkan hukum yang haram. Sebagai perbuatan hukum, Sadd al-Dzariah didasari oleh dalil-dalil Al-quran dan sunnah.

#### 1. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ<sup>٢٣١</sup>

Artinya: “Janganlah kamu mencaci tuhan yang mereka sembah karna mereka nanti akan mencaci Allah dengan melampaui batas pengetahuan” (Q.S. Al An'am: 108)

Ayat diatas menjelaskan tentang mencaci maki Tuhan ini merupakan sadd al-dzari'ah yang akan menimbulkan adanya suatumafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Oleh karena

<sup>231</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, sebelum adanya balasan dari caci maki tersebut, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan Sadd al-Dzari'ah.

2. Sunnah

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ الْكَبَائِرِ شَتَمَ الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ، قِيلَ : وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٢٣٢

Artinya : Abdillah bin Amru bin Al Ash RA, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk dalam dosa besar yaitu, seorang lelaki yang mencela kedua orang tuanya.” Ditanyakan kepada Beliau,, “Bagaimana caranya seorang lelaki itu mencela kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Ya, tatkala Seorang lelaki cela ayah orang lain, berarti ia mencela ayahnya sendiri, demikian jika ia mencela ibu orang lain, berarti ia mencela ibunya sendiri”.

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep sadd Al-dzari'ah. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (zhann) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks sadd al-dzari'ah<sup>233</sup>.

3. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan sadd al-Dzari'ah adalah:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

<sup>232</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *op.cit.*, hlm. 536

<sup>233</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazhair, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hal. 176.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”<sup>234</sup>

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, sadd al-dzari’ah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam sadd al-dzari’ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

Dispensasi Kawin bagi pasangan calon pengantin yang daftarkan di Pengadilan Agama Rengat tahun 2018 memiliki berlatar belakang persoalan pengajuan yang berbeda-beda, yakni, ada yang dengan alasan anak pemohon sudah melakukan hubungan suami istri, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan suka sama suka dan sulit untuk dipisahkan.

Jika dalam proses persidangan kita melihat keterangan saksi dalam persidangan secara cermat, bahwa hubungan yang tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan, dispensasi kawin ini merupakan bentuk perlindungan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

<sup>234</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz, 100 Kaidah Fikih dalam kehidupan sehari-hari*, Cet 1, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 162.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penulis, dikabulkannya oleh Hakim permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tuanya terhadap anak yang masih dibawah umur sudah tepat dan sesuai dengan kaidah

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”<sup>235</sup>

Jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab syar’i yang dibenarkan untuk mempermudah atau meringankan kesukaran dari subjek hukum pada saat melaksanakannya.

Kemaslahatan manusia menurut Islam ada tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan pokok pelengkap (*tahsiniyat*)<sup>236</sup>.

Kebutuhan *daruriyat* meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu, yang paling utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Sedangkan kebutuhan pokok

<sup>235</sup> Abdul Karim Zaidan, 162.

<sup>236</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 329-330.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama<sup>237</sup>.

Kebutuhan sekunder manusia (*hajiyyat*) secara prinsip adalah segala sesuatu kebutuhan yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan muamalah dan mubadalah bagi mereka<sup>238</sup>. Sedangkan kebutuhan pelengkap manusia berhubungan dengan segala kebutuhan yang dapat memperindah atau memperelok keadaan manusia<sup>239</sup>.

Dalam penjabaran diatas kebutuhan manusia memiliki tatanan yang bertingkat, maksudnya ialah masing-masing kebutuhan ini memiliki nilai penting sehingga secara jelas kebutuhan pokok yang dijelaskan sebelumnya itu merupakan kebutuhan utama, sehingga jika manusia ingin memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) itu tidak boleh bertentangan atau melanggar kebutuhan pokok manusia.

Hakim Pengadilan Agama Rengat dalam mengabulkan Dispensasi Kawin yang diajukan orang tua terhadap anaknya yang ingin menikah namun masih dibawah umur ini lebih mementingkan kepentingan anak dengan mengedepankan maslahat dan berusaha mencegah masfadat yang ditimbulkan jika Dispensasi ini tidak dikabulkan. Adapun maslahat dan masfadat dari Dispensasi Kawin tersebut ialah sebagai berikut:

<sup>237</sup>*Ibid.* hlm. 334.

<sup>238</sup>*Ibid*, hlm. 333-336.

<sup>239</sup>*Ibid*, hlm, 339-340.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dari segi masalahat

Jika dilihat dari Hakim Pengadilan Agama Rengat memberikan izin dispensasi kawin bagi calon pengantin dibawah umur ini ada beberapa kategori yang dapat penulis kemukakan yaitu:

a. Menjauhkan zina

Banyak orang tua takut jika melihat anak perempuannya sudah sedemikian akrabnya dengan seorang laki dari melakukan zina, ketakutan orang tua tersebut mendoorong untuk menikahkan anaknya walaupun anaknya masih dibawah umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga orangtua harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin menikahkan anaknya tersebut dengan tujuan dengan menjauhkan keduanya terjerumus dari perbuatan zina.

b. Meminimalisir Nikah Siri

Pernikahan tidak tercatat di Indonesia masih marak terjadi banyak hal yang menjadi latar belakangnya, dispensasi kawin ini merupakan langkah patuh hukum yang para orang tua yakni untuk meminta izin kepada hakim untuk dapat menikahkan anaknya meski anaknya masih dibawah umur, jika dispensasi kawin ini tidak dikabulkan oleh hakim maka akan menimbulkan banyaknya pernikahan secara sirri di Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menjaga diri

Memelihara diri dari Kerusakan dan Pernikahan itu bertujuan menjaga kehormatan, kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga<sup>240</sup>. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karena perlulah menyalurkan dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.

d. Menjaga kehormatan keluarga.

Banyak kalangan masyarakat saat ini terpengaruhi teknologi yang bisa mengakses apa saja, tidak luput pengaruh itu menguasai kalangan anak-anak ataupun remaja, sehingga banyak anak remaja yang salah bergaul mengakibatkan terjerumus kedalam bergaulan bebas yang bisa menyebabkan hamil diluar nikah. Wanita yang hamil diluar pernikahan, apa bila tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang

<sup>240</sup> Syamsudin Yusooff, *Pernikahan Beda Agama*, cet ke-1, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau 2011), hlm. 262.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghamilinya akan berakibat pada hilangnya kehormatan dirinya dan keluarganya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan mengenai bahwa dispensasi kawin ini ialah berhubungan dengan kepentingan manusia, yakni menjaga manusia dengan lima asas yang terdapat dalam (*doruriyat*).

2. Dari segi masfadat (kerusakan)

Jika dilihat dari segi masfadat dari dikabulkannya dispensasi kawin, yakni sebagai berikut:

a. Pendidikan

Ketika orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya menikah diusia dini ini yang menjadikan hak-hak anak hilang, salah satunya hak anak yakni hak untuk memperoleh pendidikan. Karena peraturan-peraturan sekolah yang tidak mengizinkan siswanya untuk menikah dengan kondisi seperti ini konsisi pekerjaan anak yang menikah diusia dini yang rata-rata sebagai petani, buruh, dan bahkan ada yang belum bekerja.

b. Resiko Perceraian.

Pernikahan yang seharusnya dilakukan oleh yang sudah matang mentalnya tidak labil, namun jika pernikahan yang dilakukan pada usia dini dengan kondisi kematangan mental belum terbentuk dan memiliki sikap yang masih labil, maka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dimungkinkan terjadi perselingkuhan karena perasaan menyesal karenatelah memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang bukan benar benar dicintainya. begitu juga dengan ketidak mandirian si anak sehingga memicu kebosanan dalam berumah tangga dan memicu terjadinya keretakan dalam rumah tangga.

#### c. Anemia

Hamil di usia remaja juga dapat menyebabkan anemia saat kehamilan. Anemia ini disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Itu sebabnya, untuk mencegah hal ini, ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah setidaknya 90 tablet selama masa kehamilan.

Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan. Anemia yang sangat parah saat kehamilan juga dapat berdampak pada perkembangan bayi dalam kandungan<sup>241</sup>.

#### d. Resiko meninggal ketika melahirkan

Menurut National Health Service, perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko mengalami kematian saat persalinan. Pasalnya, di usia belia ini tubuh mereka belum matang dan siap secara fisik untuk melahirkan.

<sup>241</sup> <http://helogether.com/author/novita> "Bahaya Kesehatan yang Timbul Akibat Pernikahan Dini" dalam <http://helogether.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-aibat-pernikahan-dini/> akses pada Jumat, 28 Agustus 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, panggul mereka yang sempit karena belum berkembang sempurna juga dapat menjadi penyebab bayi meninggal saat dilahirkan<sup>242</sup>.

Keberadaan hukum salah satunya berfungsi untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia, namun hal ini tidak serta merta dapat dilakukan tanpa adanya suatu sarat penyebab. Dalam Islam hal ini disebut dengan aspek Sabab (penyebab). Sabab terbagi kedalam dua jenis yakni penyebab yang diluar batas kemampuan manusia dimana penyebabini merupakan kekuasaan mutlak Allah seperti berubahnya waktu siang menjadi malam, dan penyebab yang berada dalam batas kemampuan manusia. Penyebab yang dalam batas manusia terbagi lagi menjadi dua pandangan, yakni dalam pandangan hukum *taklifi* dan pandangan hukum *wad'i*<sup>243</sup>.

Menurut penulis ketika dispensasi kawin ini dimasukkan dalam aspek sebab, yang mana ketika orang tua hendak menikahkan anaknya diusia dini dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini adalah penyebab yang masih dalam batas kemampuan manusia, artinya ialah orang tua memiliki kemampuan untuk mencegah hal itu, terlebih lagi telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya baik secara *taklifi* maupun *wad'i*. dari aspek ini seharusnya orang tua yang mengajukan dispensasi kawin harus dikembalikan kepada hukum *taklifi* terlebih dahulu baru kemudian kepada hukum *wad'i* dengan catatan manakala dalam hukum taklifi tidak terdapat kejelasan. Terkait dengan dispensasi kawin, jelas sekali bahwa dalam hukum

<sup>242</sup> *Ibid.*

<sup>243</sup> Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqh Jilid I., Op.cit.*, hlm. 331-336.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*taklifi* telah ada ketentuan yang mangaturnya meskipun hukumnya dipandang kurang relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia, apalagi yang hamil duluan. Sebab, tanpa adanya sanksi tersebut dikhawatirkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan suatu pelanggaran tidak akan dapat terlaksana.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini secara tidak langsung memberikan peluang bagi anak remaja untuk menikah, karna tidak ada batasan dan sanksi yang di cantumkan dalam Undang-undang perkawinan tersebut. Sehingga tidak ada yang dikhawatirkan oleh para pelaku padahal ini bisa merugikan dirinya sendiri. Undang-undang perkwainan ini dikhawatirkan menjadi alat legalitas secara tidak langsung mengenai kebolehan zina dan hamil di luar nikah untuk melangsungkan pernikahan pada usia Remaja.

Jika Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian dijadikan alat legalitas untuk melegalkan zina dan hamil di luar nikah untuk melangsungkan pernikahan di usia remaja, maka ini bertentangan dengan kaidah hukum islam:

الضرار يزال

Artinya: “Bahaya harus dihilangkan”

Makna dari kaidah ini adalah diwajibkan untuk menghilangkan bahaya, sekalipun kalimatnya dinyatakan dalam bentuk normatif, akan tetapi yang dimaksud adalah penekanan atas diwajibkannya menghilangkan bahaya. Sebab bahaya merupakan salah satu bentuk kezhaliman dan hukumnya haram



menurut syariat Islam. Apabila demikian, maka wajib mencegah terjadinya bahaya dan apabila terjadi maka bahaya itu wajib dihilangkan<sup>244</sup>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>244</sup> Dr. Abdul Karim Zaidan, *loc.cit.*, hlm. 144.